

**PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PULAU SUMATERA PERIODE 201202017**

(Skripsi)

Oleh

Ismaya Inton Dwingga



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

LOCALY GENERATED REVENUE AND ECONOMIC GROWTH AT THE SUMATERA ISLAND IN INDONESIA PERIODE 2012-2017

By

Ismaya Inton Dwingga

This study aims to explain the effect of locally generated revenue (PAD) and Economic growth (EG) at the Sumatera Island. This study used a model based on Economic Growth model Levine and Renelt (1992). This study used secondary data that taken from the website of the *Badan Pusat Statistik* (BPS), and *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan* (DJP) to researched year period 2012-2017. This study used panel data model with cross Sectional number of 10 (ten) at the Sumatera Island. This study used a model with the approach of Random Effect Model (REM). The result showed Locally Generated Revenue (PAD), Domestic Investment (PMDN), Initial Growth (EG_{t-1}), government Expenditure (GE), and Labor (L) have positive and significant effect on economic growth (EG) in 10 (ten) provinces at the Sumatera Island period 2012-2017, *ceteris paribus*.

Keywords: domestic investment, government expenditure, initial growth, labor, locally generated revenue, panel data, and random effect model.

ABSTRAK

PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU SUMATERA DI INDONESIA PERIODE 2012-2017

Oleh

Ismaya Inton Dwingga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan model berdasarkan model pertumbuhan ekonomi Levine dan Renelt (1992). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dengan periode penelitian yaitu 2012-2017. Penelitian ini menggunakan model data panel dengan jumlah lintas individu (*Cross Section*) sebesar 10 (sepuluh) provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), *Initial Growth* (EG_{t-1}), Pengeluaran Pemerintah (GE) dan Tenaga Kerja (L) secara masing-masing berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (EG) di 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera periode 2012-2017, *Ceteris Paribus*.

Kata kunci: data panel, *initial growth*, pendapatan asli daerah, penanaman modal dalam negeri, pengeluaran pemerintah, *random effect model*. dan tenaga kerja.

**PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DI PULAU SUMATERA PERIODE 2012-2017**

Oleh
Ismaya Inton Dwingga

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI
pada
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019

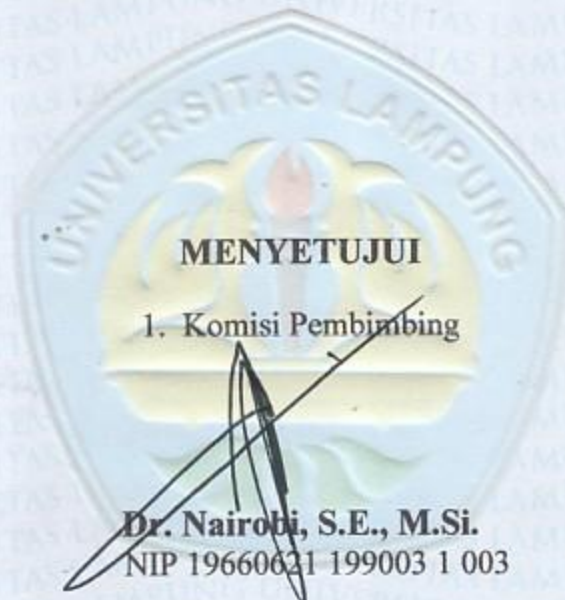
Judul Skripsi : **PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU
SUMATERA PERIODE 2012-2017**

Nama Mahasiswa : **Ismaya Anton Dwingga**

No. Pokok Mahasiswa : **1411021057**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



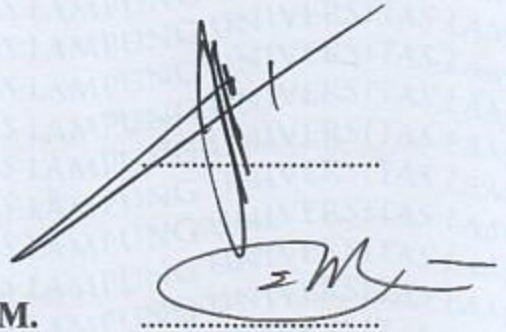
2. **Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

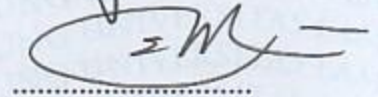
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

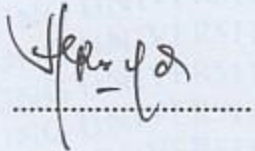
Ketua : **Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**



Penguji I : **Dr. Marselina, S.E., M.P.M.**



Penguji II : **Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Februari 2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/saksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Bandar Lampung, 21 Januari 2019



Isinaya Inton Dwingga
Isinaya Inton Dwingga

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di pekon Bandar Dalam, kecamatan Pulau Pisang, kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 21 April 1996, merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Alkussari Azi dan Herlina. Penulis menempuh pendidikannya dari bangku SDN 1 Kampung Jawa pada tahun 2001-2007, dilanjutkan ke SMPN 2 Pesisir Tengah pada tahun 2007-2010. Kemudian melanjutkan Studi ke SMAN 1 Pesisir Tengah pada tahun 2010-2014 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada tahun 2014, penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan melalui Jalur Penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dilembaga Kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis diantaranya yaitu Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Selain itu, penulis aktif dikomunitas lain yang ada di luar Universitas Lampung diantaranya Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) dan Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Pulau Pisang (IMPPP).

Tahun 2017 bulan mei, penulis melakukan kegiatan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) ke Jakarta dengan mengunjungi beberapa tempat yaitu Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), dan kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Lalu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada periode kedua tahun 2017 selama kurang lebih 40 (empat puluh) hari di desa Suban, kecamatan Merbau Mataram. Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Barang siapa yang sungguh-sungguh , sesungguhnya kesungguhannya tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri”

(QS. Al- Ankabut:6)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak megetahui”

(QS. Al-Baqarah: 216)

Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari besok. Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya

(Albert Einstein)

Tidak penting seberapa lambat anda melaju, selagi anda tidak berhenti

(Confucius)

Mimpi tidak terwujud nyata melalui Ilmu sihir. Dibutuhkan keringat, tekad dan kerja keras

(Colin Powell)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin, kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada: kedua orang tuaku yang tercinta, Alkussari Azi dan Herlina yang tiada henti melimpahkan kasih sayangnya dan selalu berdo'a untuk kesuksesan Anak-anaknya. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan dan kesabarannya sampai saat ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan yang terbaik untuk kalian, seperti yang telah ayah da ibu berikan kepada ismaya sampai saat ini. Aamiin.

Kakakku Julianda Fivironica dan Adikku tercinta Berian Yudha Koeswara yang telah memberi dukungan. Semoga menjadi anak yang selalu berbakti dan dapat membanggakan kedua orang tua. Serta terima kasih untuk seluruh keluarga besar, sahabat dan teman-teman tercinta atas semangat dan dukungannya.

Almamater tercinta Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat serta kekuatan kepada Penulis. Shalawat serta salam tak lupa Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan dalam menjalankan segala aktivitas dalam kehidupan ini.

Dengan berbekal keyakinan, ketabahan, kemauan, kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, dan juga ridho dari Allah SWT akhirnya Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Periode 2012-2017" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh Penulis dapat mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pelajaran, motivasi dan bimbingan yang sangat berharga bagi Penulis dan selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E.,M.Si., yang telah banyak memberikan masukan, saran dan motivasi yang bermanfaat bagi Penulis dan selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Marselina, S.E.,M.Si., selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan, saran dan motivasi yang bermanfaat.
5. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
6. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi yang bermanfaat dari awal perkuliahan sampai saat ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
9. Ayah dan ibu tercinta, Alkussari Azi dan Herlina. Terimakasih atas kasih sayang, dukungan, bimbingan, dan do'anya selama ini.
10. Kakakku Julianda Fivironica serta adikku Berian Yudha Koeswara, Terimakasih atas dukungan, nasihat dan perhatian yang diberikan untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
11. Sepupuku Muh Iqbal Hamdani, Ikhsan Abrori, dan Ijlal Mahfud Fadholi yang telah memberikanku semangat baru selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Universitas Lampung yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengenyam pendidikan melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Seleksi Nasional Masuk Perguruan

Tinggi Negeri (SNMPTN).

13. Teman-teman seperjuangan, berbagi suka dan duka, serta drama perskripsian Nur Amalia, Ukthiya Pirda Pangesti, Esa Eriza, dan Alin Hafiza Amanda. yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan serta cerita yang menarik selama ini.
14. Teman-teman satu konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal yaitu Safa Adhitya, Debby Anggun Kenita, Bella Anadia S, Dwi Wahyuningsih, Muhammad Rhido Jayanegara, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman Ekonomi Pembangunan Angkatan 2014 yang super solid yaitu Ahmad Safrudin, Safa Aditya, Pebri Anditama, Dewi Eva, Holiyati, Rully Septiadi, Syarif Setio dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
16. Teman-teman suka dan duka yaitu Melda Sari Syarif, serta patner Toefl ku Ezio Maradila yang yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan serta cerita yang menarik selama ini.
17. Teman-teman Perumahan Villa Cendana Asri olan felix dan mba siska terima kasih atas telah berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan serta cerita yang menarik selama ini.
18. Kepada Teman-teman yang selalu bertanya kapan saya wisuda, Khairuddin Khusman, Andan Rahayu, Turizky Azriel, Sagung Saputra Orlian, dan Herry Albar.
19. Teman-teman seperjuangan KKN di desa Suban, Annisa Irnanda dan Siti Istoqomah, Yudhandi Kuputra, dan agung Pratama terima kasih atas pengalaman dan kebersamaanya selama ini.
20. Berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Semoga segala

dukungan, bimbingan, dan do'a yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Bandar Lampung 21 Januari 2019

Ismaya Inton Dwingga

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka	19
1. Kajian Teori	19
A. Pertumbuhan Ekonomi.....	19
B. PAD.....	26
C. Investasi.....	30
D. Tenaga Kerja	36
E. Pengeluaran Pemerintah.....	40
2. Penelitian Terdahulu	47
B. Kerangka Pemikiran.....	48
C. Hipotesis	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data	53
B. Populasi dan sampel.....	54
C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	54
D. Operasional Variabel Penelitian.....	55
E. Model dan Metode Analisis	58
F. Teknik Analisis Data.....	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif	68
B. Hasil Uji Regresi Data Panel	77
C. Pembahasan Hasil Penelitian	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan90
B. Saran.....90

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan ekonomi dipulau sumatera periode 2012-2017.....	4
2. Realisasi pendapatan pemerintah provinsi seluruh Indonesia menurut jenis pendapatan (milyar rupiah) 2014-2017.....	10
3. Distribusi provinsi di Indonesia menurut kategori tingkat kemandirian 2014-2017	12
4. Pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHK tahun 2010 periode 2012-2017	13
5. Ringkasan penelitian terdahulu.....	48
6. Deskriptif variabel	69
7. PAD terhadap PDRB ADHK tahun 2010 pulau sumatera periode 2012-2017	70
8. Pertumbuhan ekonomi dipulau sumatera periode 2012-2017.....	71
9. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB ADHK tahun 2010 pulau sumatera tahun 2012-2017	73
10. Rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB ADHK tahun 2010 di pulau sumatera periode 2012-2017	75
11. <i>Initial growth</i> sepuluh provinsi di pulau sumatera periode 2012-2017	76
12. Rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk di pulau sumatera periode 2012-2017	78
13. Uji chow.....	80
14. Uji hausman	81
15. Uji LM	81

16. Estimasi data panel	82
17. Hasil parameter individual	82
18. Uji simultan.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Klasifikasi penduduk berdasarkan ketenagakerjaan	39
2. Skema Kerangka Berpikir Penelitian.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rasio penadapatan Asli daerah sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L1
2. Pertumbuhan Ekonomi sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L2
3. Rasio Investasi Asing Langsung sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L3
4. Rasio pengeluaran pemerintah sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L4
5. <i>Initial Growth</i> daerah sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L5
6. Rasio Tenaga Kerja di sepuluh Provinsi di Pulau sumatera periode 2012-2017	L6
7. Hasil estimasi Model Random Effect (REM)	L7
8. Hasil Estimasi Model fixed Effect (FEM)	L8
9. Hasil Estimasi Model Common Effect (REM)	L9
10. Uji Chow	L10
11. Uji Hausman	L11
12. Uji Bruesch Pagan (LM)	L12

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan ekonomi dipulau sumatera periode 2012-2017.....	4
2. Realisasi pendapatan pemerintah provinsi seluruh Indonesia menurut jenis pendapatan (milyar rupiah) 2014-2017.....	10
3. Distribusi provinsi di Indonesia menurut kategori tingkat kemandirian 2014-2017	12
4. Pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHK tahun 2010 periode 2012-2017	13
5. Ringkasan penelitian terdahulu.....	48
6. Deskriptif variabel	69
7. PAD terhadap PDRB ADHK tahun 2010 pulau sumatera periode 2012-2017	70
8. Pertumbuhan ekonomi dipulau sumatera periode 2012-2017.....	71
9. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap PDRB ADHK tahun 2010 pulau sumatera tahun 2012-2017	73
10. Rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB ADHK tahun 2010 di pulau sumatera periode 2012-2017	75
11. <i>Initial growth</i> sepuluh provinsi di pulau sumatera periode 2012-2017	76
12. Rasio tenaga kerja terhadap jumlah penduduk di pulau sumatera periode 2012-2017	78
13. Uji chow.....	80
14. Uji hausman	81
15. Uji LM	81

16. Estimasi data panel	82
17. Hasil parameter individual	82
18. Uji simultan.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Klasifikasi penduduk berdasarkan ketenagakerjaan	39
2. Skema Kerangka Berpikir Penelitian.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Rasio penadapatan Asli daerah sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L1
2. Pertumbuhan Ekonomi sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L2
3. Rasio Investasi Asing Langsung sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L3
4. Rasio pengeluaran pemerintah sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L4
5. <i>Initial Growth</i> daerah sepuluh provinsi dipulau sumatera periode 2012-2017	L5
6. Rasio Tenaga Kerja di sepuluh Provinsi di Pulau sumatera periode 2012-2017	L6
7. Hasil estimasi Model Random Effect (REM)	L7
8. Hasil Estimasi Model fixed Effect (FEM)	L8
9. Hasil Estimasi Model Common Effect (REM)	L9
10. Uji Chow	L10
11. Uji Hausman	L11
12. Uji Bruesch Pagan (LM)	L12

1.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang maka perlu diketahui faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan faktor apa yang perlu dihindari agar pertumbuhan ekonomi tidak berjalan ditempat atau mengalami kemunduran. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu seperti; modal (investasi dan pengeluaran pemerintah), tenaga kerja dan teknologi (Sukirno, 2004)

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu daerah dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dapat menggambarkan pembangunan ekonomi tidak berjalan atau mengalami kemunduran (Hellen,2017).

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan memiliki pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan serta peningkatan keterampilan.

Menurut Sanjaya (2012), pembangunan merupakan suatu perubahan dari keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih maju sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses multidimensial yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional (Todaro, 2000). Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perbedaan produk domestik bruto tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Setiawan dan Handoko, 2005). Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan rujukan bagi pembangunan daerah atau dapat dikatakan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu konsep pembangunan ekonomi yang disusun atau direncanakan oleh

pemerintah pusat yang dijabarkan dalam rencana pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja (Suindyah,2011).

Pertumbuhan ekonomi di sepuluh (10) provinsi di Pulau Sumatera secara keseluruhan mengalami *trend Pruktuatif*. Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Provinsi Kep. Riau dengan nilai rata-rata sebesar 5,7480 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi terendah berada di Provinsi Aceh sebesar 2,4632 Persen. Pada tahun 2012 tercatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sebesar 3,8529, lalu pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 1,2445 persen, lalu pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 1,0563 dan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,8253 persen sehingga menjadi -0,7268 persen. Pada tahun 2016 mengalami perbaikan menjadi 3,3008 Persen dan ditahun 2017 menjadi 4,1920 persen. Kondisi perkonomian pada tahun 2015 disebabkan karna menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun industri (BPS,2015), bila dilihat dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komsumsi pemerintah yang juga mengalami penurunan. Selain itu hal ini juga disebabkan oleh perekonomian Aceh masih bergantung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Aceh.

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi-investasi baru maka memungkinkan akan terciptanya barang modal baru sehingga

akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004).

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2012-2017

Provinsi	Rasio Pertumbuhan Ekonomi (Persen)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	3,8529	2,6084	1,5521	-0,7268	3,3008	4,1920
Sumatera Utara	6,4496	6,0659	5,2282	5,0963	5,1750	5,1223
Sumatera Barat	6,3082	6,0781	5,8760	5,5337	5,2692	5,2856
Riau	3,7566	2,4814	2,7051	0,2244	2,2284	2,7065
Jambi	7,0331	6,8356	7,3594	4,2053	4,3697	4,6403
Sumatera Selatan	6,8320	5,3143	4,7907	4,4173	5,0420	5,5051
Bengkulu	6,8262	6,0666	5,4791	5,1340	5,2904	4,9904
Lampung	6,4397	5,7685	5,0811	5,1315	5,1505	5,1681
Bangka						
Belitung	5,5004	5,2012	4,6659	4,0826	4,1088	4,5076
Kep. Riau	7,6273	7,2081	6,6014	6,0182	5,0232	2,0098
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi	6,0626	5,3628	4,9339	3,9116	4,4958	4,4128

Sumber: *Badan Pusat Statistik* (data diolah)

Untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah (putri, 2014).

Pandapat tentang pentingnya investasi dalam manunjang pembangunan negara-negara berkembang dimulai dengan ditemukannya model pertumbuhan setelah

perang dunia ke II yaitu pada tahun 1950-an dan 1960-an oleh beberapa ahli pembangunan seperti Rostow dan Harrod-Domar. Menurut Rostow bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilitas tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004).

Menurut Atmanti (2013), Peranan investasi terhadap kapasitas produksi sangat besar, karena investasi merupakan penggerak perekonomian, baik untuk penambahan faktor produksi maupun berupa peningkatan kualitas faktor produksi, yang akan memperbesar pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara *multiplier effect*. Faktor produksi akan mengalami penyusutan, sehingga akan mengurangi produktivitas dari faktor-faktor produksi tersebut. Supaya tidak terjadi penurunan produktivitas harus diimbangi dengan investasi baru yang lebih besar dari penyusutan faktor produksi.

Selain investasi, tenaga kerja Menurut Todaro (2004) modal pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya manusia. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan diikuti dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta memiliki skill yang bagus akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, karena dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah.

juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar, namun

pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.(Helen Dkk, 2017)

Tenaga kerja juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Todaro (2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota (Sari,2016).

Pendapat yang dikemukakan Jhingan (2002) tentang perubahan struktural mengandung arti peralihan dari masyarakat tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial dan motivasi yang ada secara radikal. Perubahan struktural yang dikemukakan Jhingan (2002) tersebut akan menyebabkan kesempatan kerja semakin banyak dan produktivitas buruh, stok modal, pendayagunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi, oleh karena itu, dengan adanya perubahan struktural tersebut industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Tenaga kerja juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek

yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000), pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output di suatu daerah (Hasan, 2011).

Selain angkatan kerja, pengeluaran pemerintah juga diduga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB, sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Semakin besar pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin tinggi tingkat perekonomian suatu daerah (Wibisono, 2003).

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin penting perannya dalam perekonomian saat ini . Aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah ditunjukkan untuk perubahan struktur ekonomi oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Secara teoritis pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya

pendapatan perkapita yang semakin besar dari tahun ketahun. Peningkatan ini ditandai dengan naiknya Produk Domestik Bruto melalui bekerjanya efek pengganda. Pada gilirannya peningkatan Produk Domestik Bruto akan mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno, (2010 :168) jumlah pengeluaran pemerintah yang dilakukan dalam suatu periode tertentu bergantung pada banyak faktor diantaranya adalah jumlah pajak yang diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian yang lain ada juga yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Lubis, 2014).

Otonomi daerah yang telah diterapkan di Indonesia bertujuan untuk memberi kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan

perekonomiannya yang dapat membawa pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di setiap daerah (Nehen, 2010). Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dan kepastian tersedianya pembiayaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, seperti hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah (Bappeda, 2014). Kewenangan pemerintah daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah (Kurniawan, 2017).

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu variabel yang signifikan adalah belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat maupun dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba daerah dan lain lain pendapatan yang sah (Yukiana, 2014).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, daerah diberikan hak untuk memperoleh sumber keuangan dan kepastian tersedianya pembiayaan sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan, seperti hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah (Bappeda,

2011). Kewenangan pemerintah daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Pendapatan (Miliar Rupiah), 2014-2017

No	Jenis Pendapatan	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	121 451	127 497	133 179	140 994
	a. pajak daerah	103 088	107 892	112 690	120 198
	b. restribusi daerah	1 705	1 690	1 876	1 800
	c. kekayaan daerah yang di pisahkan	2 972	3 224	3 159	3 595
	d. lain-lain PAD yang sah	13 685	14 692	15 455	15 401
2	Dana perimbangan	68 883	61 589	113 733	153 767
	a. bagi hasil pajak	17 482	13 330	22 176	26 724
	b. bagi hasil bukan pajak	15 406	9 359	8 491	7 695
	c. DAU	34 122	35 289	38 538	55 418
	DAK	1 873	3 610	44 529	63 930
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	42 944	53 620	28 659	24 441
	JUMLAH TOTAL	233 277	242 706	275 571	319 202

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Tabel 2, menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 233,28 triliun rupiah pada tahun 2014 sebesar 242,71 triliun rupiah pada tahun 2015; dan 275,57 triliun rupiah pada tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun 2015 dan 13,54 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 15,83 persen menjadi 319,20 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2017, lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari dana perimbangan, khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang

mengalami kenaikan sebesar 43,80 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan ini merupakan salah satu akibat penambahan cadangan DAU yang berasal dari penundaan pembayaran DAU untuk tahun anggaran 2016. Selain itu, peningkatan pendapatan juga didukung oleh meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya komponen hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang naik sebesar 13,80 persen dibandingkan tahun 2016.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal, Selama periode tahun 2014-2017, PAD terus mengalami kenaikan, yaitu dari 121,45 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 127,50 triliun rupiah pada tahun 2015 dan 133,18 triliun rupiah pada tahun 2016. Pajak daerah merupakan komponen yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap PAD. Pada tahun 2017, PAD ditargetkan naik menjadi 140,99 triliun rupiah, sedangkan penerimaan pajak daerah ditargetkan meningkat sebesar 6,66 persen.

Pendapatan Asli Daerah merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali”, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat

kemandirian “rendah”, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang”, menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi”, bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah provinsi pada tahun 2014 hingga 2016 berkisar antara 40 hingga 60 persen, sehingga secara rata-rata tingkat kemandirian provinsi di Indonesia pada tahun-tahun tersebut dikategorikan sedang. Pada tahun 2014 tingkat kemandirian provinsi di Indonesia sebesar 52,06 persen dimana masuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa secara umum pemerintah provinsi sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Pada tahun 2015, kontribusi PAD mengalami kenaikan menjadi 52,53 persen, dan mengalami penurunan menjadi 48,33 persen pada tahun 2016. Pemerintah provinsi sangat berhati-hati dalam mentargetkan anggaran PAD-nya pada tahun 2017, karena khawatir tidak dapat memenuhi target, sehingga porsi PAD terhadap total pendapatannya menurun menjadi 44,17 persen. (BPS, 2017)

Tabel 3. Distribusi Provinsi di Indonesia Menurut Kategori Tingkat Kemandirian 2014-2017

Kategori Kemandirian	2014	2015	2016	2017
Rendah Sekali (0-25%)	7	7	8	10
Rendah (>25-50 %)	15	15	19	17
Sedang (>50- 75 %)	11	10	7	7
Tinggi (>75%)	0	1	0	0
JUMLAH	33	33	34	34

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah. Kenaikan PAD ini jika dibelanjakan untuk membiayai kegiatankegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD (sitaniapessy, 2013).

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sepuluh Provinsi di Pulau Sumatera periode 2012-2017

Provinsi	Pendapatan Asli Daerah (Persen)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	X
Aceh	4,6370	5,1820	6,9221	8,0390	8,3401	7,9662	6,8477
Sumatera Utara	27,3095	27,7478	28,2549	29,6697	24,6255	20,4313	26,3398
Sumatera Barat	19,7467	25,1463	23,669	22,6221	21,1081	17,7085	21,6668
Riau	16,8969	16,5438	21,3695	18,6394	16,5398	18,2253	18,0358
Jambi	17,1382	15,6746	18,6124	17,6576	17,8168	18,8075	17,6179
Sumatera Selatan	17,7847	18,7846	21,1926	19,4354	18,5410	18,5410	19,0466
Bengkulu	14,7566	14,9097	16,3164	14,9184	17,8662	45,2858	20,6755
Lampung	21,6578	22,6793	25,2184	21,7933	21,2293	19,7578	22,0560
Bangka							
Belitung	14,3781	15,7941	16,0073	14,0230	13,1788	14,7030	14,6807
Kep. Riau	15,3084	15,4034	15,9405	19,3332	18,6371	49,3929	20,6331
Rata-rata PAD	16,9614	17,7866	19,3503	18,6131	17,7883	23,0819	18,7600

Sumber: *Badan Pusat Statistik*, (data diolah).

Dari Tabel 4, di ketahui Rasio Pendapatan Asli Daerah di sepuluh (10) provinsi yang ada di Pulau Sumatera secara keseluruhan mengalami peningkatan atau berada dalam trend positif dengan nilai rata-rata sebesar 18,76 persen. Pendapatan Asli Daerah tertinggi berada pada Provinsi Sumatera Utara dengan nilai rata-rata sebesar 26,33 persen. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 29,66 persen. Lalu peningkatan Pendapatan Asli Daerah-nya sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 24,62 persen. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah terendah berada pada Provinsi Aceh dengan nilai rata-rata sebesar 6,84 persen. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satu variabel yang signifikan adalah Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba daerah dan lain lain pendapatan yang sah. Pemerintah daerah mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan dalam hal pendapatan daerah, sehingga mereka harus mendapat dukungan sumber keuangan diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan daerah yang meningkat merupakan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga meningkat (Yuliana, 2017)

Di samping itu, menurut Levine dan Renelt (1992) *initial growth* merupakan suatu komponen yang akan selalu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu, jika seorang peneliti ingin menganalisis pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka *initial growth* harus dimasukkan ke dalam modelnya. *Initial growth* akan selalu berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik berpengaruh positif ataupun negatif. Tanda positif menunjukkan bahwa terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yang artinya perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih cepat daripada di

daerah kaya. Dengan kata lain, daerah miskin mampu mengejar daerah kaya dilihat dari sisi perekonomiannya. Sedangkan, tanda negatif menunjukkan bahwa terjadi divergensi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, yang artinya perekonomian di daerah miskin tumbuh lebih lambat daripada di daerah kaya. Dengan kata lain, daerah miskin belum mampu mengejar perekonomian daerah kaya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu berapa besar pengaruh pendapatan asli daerah, investasi, tenaga kerja, *Initial Growth* dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di sepuluh provinsi di pulau sumatera pada tahun 2012-2017.

B. Rumusan Masalah

Indonesia memiliki penerimaan Negara yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, hal ini diikuti oleh pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya menurunkan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan masalah lainnya.

Pulau Sumatera merupakan Pulau Kedua setelah Pulau Jawa yang memiliki posisi yang cukup strategis baik ditinjau dalam lingkup nasional yang masih mengalami proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, namun Sumatera masih memiliki kendala utama dalam mencapai harapan untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendala utama adalah proses Hilirisasi. Sehingga proses Hilirisasi pada pelaku ekonomi kecil masih belum sepenuhnya dapat dilakukan, Dalam mencapai suatu

kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung adanya pemerataan pendapatan di masyarakat, di Indonesia antara kesempatan antara kesempatan kerja dan yang ada dengan angkatan kerja terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran yang berdampak pada kehidupan sosial yakni peningkatan tingkat kriminal, hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, investasi yang tepat sasaran akan sama-sama meningkatkan perekonomian bangsa yang akan mendorong kegiatan produksi di masa yang akan datang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selain itu, tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas, dan pelaksana dalam upaya pembangunan di daerah tersebut, semakin tinggi atau banyak tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi maka akan meningkat pula output yang dihasilkan sebuah industri ataupun perusahaan barang/jasa sehingga nantinya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang semakin penting perannya dalam perekonomian saat ini. Aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah ditunjukkan untuk perubahan struktur ekonomi oleh kebijakan fiskal melalui penetapan rencana anggaran penerimaan dan belanja negara. Secara teoritis pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat akan mendorong meningkatnya pendapatan perkapita yang semakin besar dari tahun ketahun. Jumlah pengeluaran pemerintah yang

dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung pada banyak faktor diantaranya adalah: jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang dan pertimbangan politik dan keamanan.

Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu modal yang digunakan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi positif memiliki kemungkinan kenaikan Pendapatan Asli Daerah atau dengan kata lain adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi atau PDRB dan diantara pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah diyakini terdapat adanya korelasi. Pemerintah daerah dalam mengoptimalkan dan mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berimbas pada penekanan tingkat pengangguran dan mengurangi kemiskinan, maka diperlukan pengelolaan alokasi anggaran sebagai salah satu strategi pengelolaan pendapatan. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan / ketimpangan regional (Kuncoro, 2004).

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan *initial growth* secara masing-masing mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 10 (Sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera periode 2012-2017?

2. apakah Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri , tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan *initial growth* secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 10 (Sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera periode 2012-2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dipulau Sumatera pada tahun 2012-2017?
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dipulau Sumatera pada tahun 2012-2017?
3. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dipulau Sumatera pada tahun 2012-2017?
4. Untuk mengetahui pengaruh *initial growth*, pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dipulau Sumatra pada tahun 2012-2017?

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberi manfaat, bagi peneliti maupun orang lain yaitu antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Memperkaya wacana pustaka bagi Akademika Universitas Lampung yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Teori

1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika output barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perubahan nilai PDB dapat menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (*National Income*). Perhitungan pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulan dan tahunan. Adapun konsep perhitungan pertumbuhan ekonomi dalam satu periode (Sukirno, 2004):

$$G_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{(t-1)})}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Di mana:

G_t = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

$PDRB_t$ = Produk Domestik Bruto Riil periode t (berdasarkan harga konstan)

$PDRB_{t-1}$ = PDRB satu periode sebelumnya

Perhitungan PDB dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. PDRB menurut harga berlaku Dimana PDB faktor inflasi yang masih terkandung di dalamnya.
- b. PDB menurut harga konstan Dimana PDB dengan meniadakan faktor inflasi Artinya pengaruh perubahan harga telah dihilangkan.

Menurut Todaro (2006) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi. Pertama, akumulasi modal (*capital accumulation*) akan diperoleh apabila sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan investasikan dengan tujuan meningkatkan output dan pendapatan dimasa depan. Kedua, pertumbuhan angkatan kerja akan diperoleh apabila angkatan kerja tersedia dalam jumlah penduduk yang besar dapat berproduktif dan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik. Ketiga, kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional. Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bahwa sumber kemajuan ekonomi dapat ditelusuri ke berbagai faktor, tetapi dengan investasi yang besar memperbaiki kualitas sumber daya fisik dan sumber daya manusia, meningkatkan kuantitas sumber daya produksi yang sama, dan meningkatkan produktifitas dari semua atau sumber daya khusus melalui penemuan, inovasi, dan kemajuan teknologi menjadi faktor utama dalam merangsang pertumbuhan ekonomi disetiap lapisan masyarakat.

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat ekonomi yang digunakan. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Apabila terdapat kekurangan penduduk dan kekayaan alam relative berlebihan, maka tingkat pengembalian modal dari investasi semakin tinggi dan para investor semakin banyak mengalami keuntungan, sehingga menimbulkan investasi baru serta pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Apabila jumlah penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, sehingga kemakmuran masyarakat menurun (Sukrino, 2004).

Pandangan klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Pandangan Jean Baptish Say atau Hukum say menyebutkan "*supply creates its own demand*" menjelaskan bahwa dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan menyebabkan setiap jenis barang yang diproduksi dapat terjual di pasar. Permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia.

Berdasarkan kepada keyakinan ini para ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa disetiap perekonomian akan selalu dicapai kesempatan kerja penuh. Masyarakat

yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut:

Dimana:

Y = Pendapatan Nasional yang diwujudkan dalam perekonomian.

K = jumlah barang modal yang tersedia.

L = jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia.

Q = jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan.

T = tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi.

$$Y = f(K, L, Q, T)$$

2. Teori Harrod-Domar

Menurut teori pertumbuhan Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan adanya keseimbangan antara dana pembangunan yang tersedia (s) yang diukur oleh persentasenya terhadap produksi nasional dengan incremental capital output ratio (k) yaitu jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output, dengan rumus: $Y/Y = s/k$. Analisis ini menunjukkan bahwa investasi harus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Pertambahan pengeluaran agregat dalam jangka panjang perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan

ekonomi (Sukirno, 2004). Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pekerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio* = COR) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capitaloutput ratio* = ICOR).

Ilmu ekonomi dikenal sebagai rasio modal-output (*capital-output ratio*) adalah 3 berbanding 1. Rasio modal-output dan rasio tabungan nasional (*National Saving Ratio*), merupakan persentase atau bagian tetap dari output nasional yang selalu ditabung dan jumlah investasi (penanaman modal) baru ditentukan oleh jumlah tabungan total (S), maka dapat menyusun sebuah model pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Tabungan (S) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau s , dari pendapatan nasional
2. Investasi neto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal, (K) yang dapat diwakili oleh K
3. Terakhir, tabungan nasional neto (S) harus sama dengan investasi neto (I)

Analisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod Domar bertujuan untuk syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Pada suatu tahun tertentu barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh sehingga pengeluaran agregat akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun selanjutnya. Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun tersebut akan menambah kapasitas modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun selanjutnya.

3. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan Neo Klasik melihat dari sudut pandangan yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini yang di kembangkan oleh Abramovis dan Solow bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor faktor produksi. Pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$Y = f (K, L, T)$$

dimana :

Y= tingkat pertumbuhan ekonomi

K= tingkat pertumbuhan modal

L= tingkat pertumbuhan penduduk

T= tingkat pertumbuhan teknologi

Menurut Teori pertumbuhan Solow merupakan salah satu pelopor dalam teori pertumbuhan Neoklasik yang dapat memberikan pandangan yang dinamis tentang bagaimana tabungan mempengaruhi perekonomian dari waktu ke waktu. Teori ini merupakan modifikasi dari model pertumbuhan Harrod-Domar, yang menyatakan bahwa secara kondisional perekonomian berbagai negara akan bertemu

(*convergence*) pada tingkat pendapatan yang sama. Syarat yang harus dipenuhi adalah negara-negara tersebut mempunyai tingkat tabungan, depresiasi, pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan produktifitas yang sama. Konvergensi peningkatan pendapatan dalam perekonomian terbuka akan terjadi bila terdapat hubungan perdagangan, investasi dan sebagainya dengan negara lain atau pihak luar. Model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*) menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara (Mankiw, 2007).

Asumsi utama yang digunakan dalam model Solow adalah bahwa modal mengalami diminishing returns. Jika persediaan tenaga kerja dianggap tetap, dampak akumulasi modal terhadap penambahan output akan selalu lebih sedikit dari penambahan sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (*marginal product of capital*) yang kian menurun. Jika diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka diminishing return pada modal mengindikasikan bahwa penambahan jumlah modal (melalui tabungan dan investasi) hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang susut karena depresiasi. Pada titik ini perekonomian akan berhenti tumbuh, karena diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja (Mankiw, 2007).

4. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam system

ekonomi. Menurut Todaro (2006) teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor produksi, bukan berasal dari luar faktor produksi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja, tetapi menyangkut sumberdaya manusia.

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumberdaya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen, tetapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen, peran investasi dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Mankiw, 2007).

Teori pertumbuhan Baru dapat dinyatakan oleh persamaan sederhana $Y=AK$ dalam formulasi A mewakili semua faktor yang mempengaruhi Teknologi dan mencerminkan modal fisik dan sumber daya manusia. Hasil dari persamaan investasi dalam modal fisik dan sumber daya manusia dapat menghasilkan ekonomi eksternal dan peningkatan produktifitas yang melebihi keuntungan pribadi dalam jumlah yang cukup karena hasil persamaan tersebut bahwa modal tidak menunjukkan penurunan, sehingga pertumbuhan dalam jangka panjang berkesinambungan. Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya tabungan dan investasi modal manusia untuk mempercepat pertumbuhan.

1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di singkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah perlu terus di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. (Darise, 2009) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendanaan daerah

2.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah-daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). pajak daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulator*). Sebagai pendapatan pajak daerah, setiap pajak harus memenuhi smith's canons yang terdiri dari unsur keadilan (*equity*), unsur kepastian (*Certainty*), unsur kelayakan (*Convenience*),

efisien (*Efficiency*), dan unsur ketepatan (*Adequacy*). Besarnya tarif pajak daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibagi dalam 2 jenis meliputi:

1. Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan.
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g. Pajak Parkir.
 - h. Pajak Air Tanah.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Restribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah yang selanjutnya disebut

retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil (tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar), dan merupakan pungutan yang sifatnya budgettair tidak menonjol. Retribusi daerah untuk tiap-tiap daerah berbeda-beda jenis dan ragamnya tergantung potensi yang ada di tiap-tiap daerah. Secara umum retribusi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha.
3. Retribusi Perijinan Tertentu.

2.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Menurut Halim dan Kusufi (2012), hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

2.3 Investasi

Investasi pada hakekatnya merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2007). Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk membuat produksi barang dan jasa di masa depan. Investasi seringkali mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada

akumulasi modal yang bisa meningkatkan output potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson, 2003).

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing. Peningkatan investasi akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan kesempatan kerja yang produktif, sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Harrod-Domar menggabungkan dari pendapat kaum Klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007).

1. Penanaman Modal Asing (FDI)

Menurut UU no. 1 Th. 1967 dan UU no 11 Th. 1970 tentang PMA, yang dimaksud dengan (FDI) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa

pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan pengertian Modal Asing, antara lain :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi dalam menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2004). Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya Penanaman Modal Asing antara lain:

- a. Produksi beberapa produk kebutuhan rakyat dengan tujuan untuk ekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya berasal dari Indonesia akan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya).
- b. Bila produksi mengalami kegagalan maka seluruh resiko ditanggung oleh penanam modal dalam investasi langsung (investor asing).
- c. Tenaga kerja Indonesia akan memperoleh kesempatan kerja dan dapat membiasakan diri dengan teknologi modern.

- d. Terbukanya kesempatan untuk membangun perusahaan nasional yang sejenis, sehingga akan dapat meningkatkan pembangunan,
- e. Devisa akan meningkat jumlahnya, selain akan meningkatkan nilai tukar rupiah dalam negeri, dana untuk pembangunan juga meningkat.
- f. Langsung memperkenalkan manfaat ilmu, teknologi dan organisasi yang mutakhir kenegara yang dituju.
- g. Mendorong perusahaan lokal untuk berinvestasi lebih banyak pada industry pendukung atau dengan bekerjasama dengan perusahaan asing.
- h. Sebagian laba pada umumnya ditanamkan kembali pada pengembangan atau modernisasi industri terkait.
- i. Kemungkinan terjadi pelarian modal berkurang.

Namun kerugian yang dapat diperoleh dengan adanya Penanaman Modal Asing antara lain:

- a. Penyediaan sejumlah modal oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam kenyataannya malah justru menurunkan tingkat tabungan maupun investasi domestik di negara tuan rumah sehubungan dengan akan terciptanya aneka bentuk persaingan tidak sehat yang bersumber dari perjanjian-perjanjian produksi eksklusif antara pihak perusahaan multinasional dengan pihak pemerintah di negara tuan rumah.
- b. Tidak terlaksananya reinvestasi atas keuntungan yang mereka dapatkan dalam perekonomian tuan rumah.
- c. Terhambat atau terganggunya perkembangan perusahaan-perusahaan domestik yang sebenarnya bisa menjadi pemasok barang sejenis.

- d. Terpacunya tingkat konsumsi domestik sehingga justru menurunkan minat masyarakat setempat untuk menabungkan atau menginvestasikan tambahan pendapatan
- e. Dalam jangka panjang PMA dapat mengurangi penghasilan devisa baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal.
- f. Kecilnya kontribusi yang didapatkan bagi penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak yang disebabkan oleh adanya konsesi-konsesi pajak yang bersifat liberal, pemberian fasilitas penanaman modal yang berlebihan, subsidi-subsidi terselubung, serta proteksi yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Undang-Undang no. 6 tahun 1968 dan Undang-Undang no.12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu dalam pasal 1 definisi modal dalam negeri Pertama undang-undang ini dengan modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Kedua pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini dapat terdiri atas perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan penanaman modal dalam negeri ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk

menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang Pengertian PMDN yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara republik Indonesia. Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk (Undang-Undang No. 25 Tahun 1997):

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Penanaman modal dalam negeri ini akan menciptakan beberapa manfaat diantaranya mampu menghemat devisa, mengurangi ketergantungan terhadap produk asing, mendorong kemajuan industri dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja. Semakin besarnya investasi PMDN, maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumber daya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDB dan diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Dengan demikian investasi PMDN memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.4 Tenaga Kerja

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar (Todaro, 2009). Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif kepada pembangunan ekonominya.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas.

Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ekonomi adalah tenaga kerja. Setiap kegiatan produksi yang akan dilaksanakan pasti akan memerlukan tenaga kerja. Tenaga kerja bukan saja berarti buruh yang terdapat dalam perekonomian. Arti tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya tenaga kerja dibedakan kepada tiga golongan:

- a. Tenaga kerja kasar, yaitu tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
- b. Tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dari pendidikan atau pengalaman kerja.

- c. Tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu.

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri, pembagian kerja menghasilkan pembagian kemampuan produksi para pekerja, setiap pekerja menjadi lebih efisien daripada sebelumnya. Akhirnya produksi meningkatkan berbagai hal, jika produksi naik, pada akhirnya laju pertumbuhan ekonomi juga akan naik.

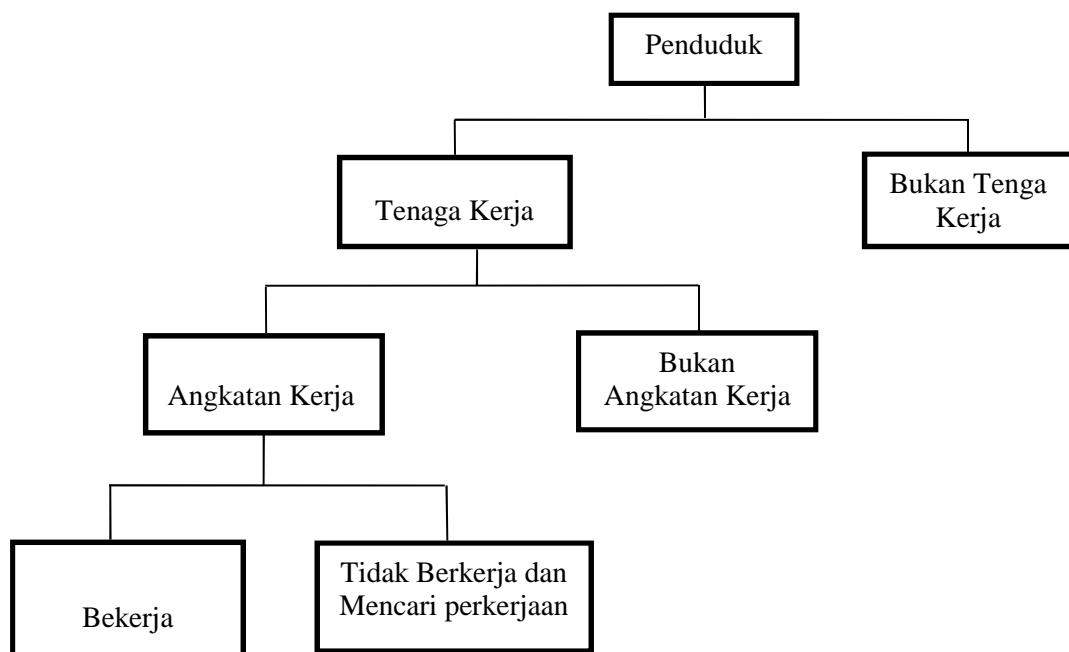
Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara berkelanjutan selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur.

Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah. dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2009). Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif kepada pembangunan ekonomi.

Kebutuhan tenaga kerja sangat penting dalam masyarakat karena merupakan salah satu faktor potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tenaga kerja menjadi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena dapat meningkatkan output dalam perekonomian berupa produk domestik regional bruto (PDRB). Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia.

a. Teori Ketenagakerjaan

Adam Smith merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal fisik baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh



Gambar 2. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Ketenagakerjaan

Dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat. Salah satu masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan tenaga kerja (*demand for labour*) dan penawaran tenaga kerja (*supply for labour*), pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan tersebut dapat berupa lebih banyaknya penawaran permintaan terhadap tenaga kerja atau lebih banyaknya permintaan dibanding penawaran tenaga kerja. perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja (Todaro, 2009). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya pertumbuhan penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2003). Penduduk yang berkerja terserap dan tersebar diberbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja.

2.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membelikan barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat.

Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat–provinsi–daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir–proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebarkannya.

fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan.
2. Fungsi pengaturan, yaitu merumuskan dan menegakkan pusat perundangan;
3. Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana.
4. Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif.
5. Fungsi koordinasi, yaitu melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah)

Menurut Arndt (1998) argumentasi mengenai kebijakan publik dalam kaitan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk mencapai efisiensi. Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya kegagalan pasar. Adapun menurut Rao (1998) kegagalan pasar tersebut disebabkan karena :

1. Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan,
2. Barang-barang yang menyebabkan eksternalitas dalam produksi maupun konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar dengan penilaian sosial dan pasar, dan pasar tidak bisa memastikan untuk memenuhi kondisi yang diinginkan.
3. Beberapa barang mempunyai karakteristik increasing returns to scale. Dalam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan

sebagai produsen atau ada subsidi pada sektor swasta untuk menutup biaya karena memproduksi secara optimal.

4. Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa seperti asuransi sosial dapat memberi peningkatan moral hazard dan pemilihan kurang baik. Oleh karena itu intervensi negara diperlukan agar menjamin pendistribusian kembali pendapatan.

Mundle (1998) berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai intervensi kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi: (Suparmoko, 2000):

- a. Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas. Berdasarkan atas penilaian ini kita dapat membedakan bermacam-macam

pengeluaran negara seperti: Pengeluaran yang *self liquidating* sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.

- b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan, kesehatan masyarakat (*public health*).
- c. Pengeluaran yang tidak *self liquidating* maupun yang tidak reproduktif yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang-bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek *tourisme* dan sebagainya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
- d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan/perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
- e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak

dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa mendatang pada waktu usia yang lebih lanjut pasti akan lebih besar.

Di Indonesia, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu:(Dumairy, 2001) :

- a. Pengeluaran rutin yaitu, pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran belanja rutin memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Penghematan dan efisiensi pengeluaran rutin perlu dilakukan untuk menambah besarnya tabungan pemerintah yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan melalui penajaman alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen / lembaga negara non departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.
- b. Pengeluaran pembangunan, yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik dan non fisik. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-

program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan.

3 Penelitian Terdahulu

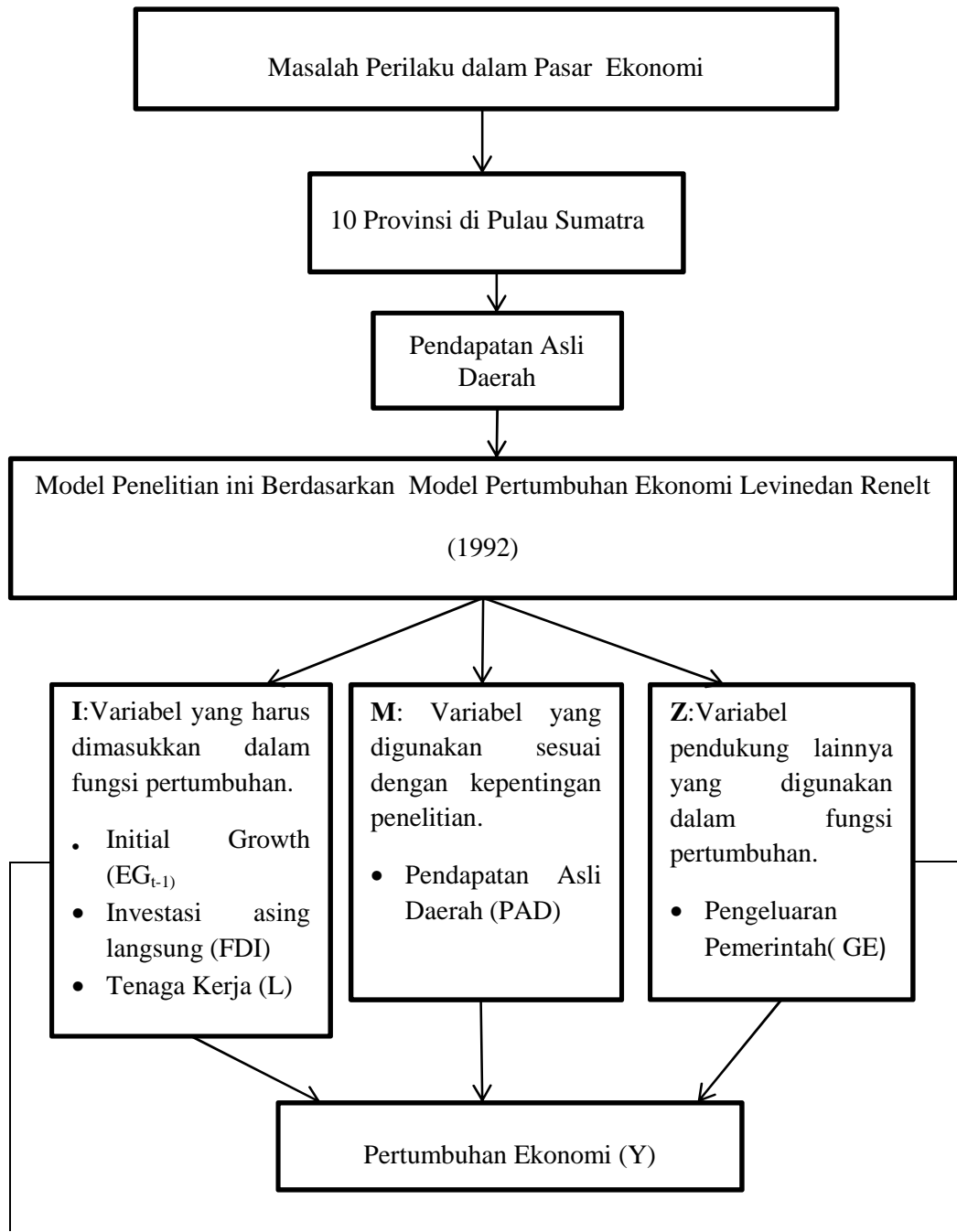
Tabel 5. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Agus Indriatno Kurniawan,dkk (2017)	Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di kutai barat	metode analisis jalur atau Path Analysis	Variabel investasi swasta, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja, masing-masing berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi
2	Phany Ineke Putri (2014)	Pengaruh Investasi, tenaga kerja, belanja modal, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau jawa	Panel ordinary square (PLS)	Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu PMDN, PMA, tenaga kerja, belanja modal, infrastruktur yang meliputi jalan aspal, dan listrik mempunyai pengaruh yang positif signifikan, sedangkan variabel jalan tidak aspal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa periode tahun 2007-2011.
3	Mutia Sari,Dkk (2016)	Pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Ordinary Least Square (OLS)	Investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4	Citra Ayu Basica dan Effendy Lubis (2014)	Pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan	Panel ordinary square (PLS)	Jumlah tenaga kerja,tingkat pendidikan pekerja dan pengeluran pemerintah berpengaruh positif dan signifiakn

		pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi			terhadap pertumbuhan ekonomi
5	Paula Nistor (2014)	FDI economic growth Romania	and in	Regresi Autokorelasi Durbin-Watson	Investasi asing langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di rumania
6	Afrizal Tahar & Maulida Zakhya (Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertubuhan Ekonomi Daerah		regresi linier berganda	PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah.
7	Ross Levine, dan David Renelt (1992).	Analisis Sensitivitas: Rehresi pertumbuhan Lintas Negara		Regresi lintas Negara dan varian analisis batas extream.	Terdapat hubungan positif dan kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi dan tingkat perdagangan internasional. Pupulasi akan selalu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Initial growth akan selalu berdamoak positif maupun negative yang menunjukkan adanya konvergensi dan divergensi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah.

B. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju waktu yang lebih baik dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dari kenaikan pendapatan nasional. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir Penelitian

Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan memiliki pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita secara terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian semakin tinggi

pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan serta peningkatan keterampilan.

Investasi merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Besarnya tingkat investasi memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk pengembangan modal yang nantinya dapat direalisasikan ke dalam berbagai proyek sebagai penunjang kegiatan pembangunan. Penambahan investasi akan meningkatkan modal perekonomian yang disertai dengan meningkatnya proses produksi barang maupun jasa. Selain itu, tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas, dan pelaksana dalam upaya pembangunan di daerah tersebut, semakin tinggi atau banyak tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi maka akan meningkat pula output yang dihasilkan sebuah industri atau pun perusahaan barang/jasa sehingga nantinya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah (Arta, 2013).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengalami proses pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat, dalam mencapai suatu kesejahteraan salah satunya dibutuhkan kesempatan kerja yang mendukung adanya pemerataan pendapatan di masyarakat, di Indonesia antara kesempatan antara kesempatan kerja dan yang ada dengan angkatan kerja terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, hal ini akan berdampak pada terciptanya pengangguran yang berdampak pada kehidupan social yakni peningkatan tingkat criminal, hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Antara kesempatan kerja dan yang ada dengan angkatan kerja di Indonesia terjadi kesenjangan yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan peningkatan angkatan kerja yang meningkat lebih cepat, sehingga terciptanya pengangguran yang semakin meningkat. Hal ini akan berdampak pada kehidupan social yakni peningkatan tingkat criminal, hal ini akan berpengaruh Negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Selain Tenaga Kerja, Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan PDRB karena adanya kenaikan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain

pendapatan daerah. Kenaikan PAD jika digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan publik yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana, hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan PAD (Sitaniapessy, 2013).

C. Hipotesis

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja dan *Initial Growth* secara masing-masing berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera periode 2012-2017.
2. Diduga Pendapatan Asli Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga kerja dan *Initial Growth* secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera periode 2012-2017.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan

Tabel 6. Deskripsi Data Variabel

Nama Data	Simbol	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	EG	Presentase	Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)
Penanaman Modal Dalam Negeri	PMDN	Presentase	Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Presentase	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)
Tenaga Kerja	L	Presentase	Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)
Pengeluaran Pemerintah	GE	Presentase	Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK)
<i>Initial Growth</i>	IG_{t-1}	Presentase	Badan Pusat Statistik (BPS)

Data yang digunakan adalah data panel yang meliputi data APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Investasi yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tenaga kerja (L), *initial Growth* (IG_{t-1}), pengeluaran pemerintah (GE).

serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional dan Daerah (BPS), Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk), serta lembaga yang terkait lainnya.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh provinsi di pulau Sumatera. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di pulau Sumatera dari tahun 2012-2017. Adapun teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah *Non Probability Sampling* dengan Pendekatan *purposive Sampling*. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh Provinsi di pulau Sumatera yang mengeluarkan laporan keuangan dari tahun 2012-2017.
- b. Seluruh Provinsi yang telah memasukkan data laporan realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah secara rutin dari tahun 2012-2017.
- c. Provinsi yang bukan merupakan hasil pemekaran wilayah dari tahun 2012-2017.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dengan cara mengunduh di website Badan Pusat Statistik (BPS), investasi yakni Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diperoleh dari website Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ,jumlah tenaga kerja tingkat Provinsi di pulau sumatera diperoleh dengan cara mengunduh di website Badan Pusat Statistik Nasional dan Daerah (www.bps.go.id). Sedangkan data pengeluaran pemerintah

tingkat provinsi diunduh melalui website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alat yang akan digunakan untuk pengujian statistik adalah software Eviews 9. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak Microsoft Excel 2007 kemudian diolah melalui Software Eviews 9.1.

D. Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (EG). Untuk mengukur variabel pertumbuhan ekonomi diproksikan melalui nilai pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2010) tingkat Provinsi di pulau Sumatera periode 2012-2017. Penulis menggunakan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan sehingga lebih menggambarkan perekonomian secara riil. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap sektor dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010):

Pertumbuhan Ekonomi = $\frac{(\text{PDRB tahun berjalan} - \text{PDRB tahun sebelumnya})}{\text{PDRB tahun sebelumnya}} \times 100\%$

PDRB tahun sebelumnya

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah tanpa memperhatikan kepemilikan asal faktor produksi atas barang dan jasa tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB suatu wilayah

dapat dilakukan melalui pendekatan pengeluaran dimana PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh pelaku-pelaku ekonomi untuk kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Komponen pengeluaran atau penggunaan PDRB ini terdiri dari:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba
- b. Pengeluaran konsumsi pemerintah
- c. pembentukan modal tetap domestik bruto
- d. perubahan inventori
- e. ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja (L), *Initial Growth* (IG_{t-1}), serta pengeluaran Pemerintah (GE).

a. Pendapatan Asli Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio realisasi Pendapatan Asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk 10 (sepuluh) provinsi di pulau sumatera pada periode 2012-2017 dalam presentase (%).

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Variabel penanaman Modal Dalam Negeri yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) untuk 10 (sepuluh) provinsi di pulau Sumatera pada periode 2012-2017 dalam presentase (%).

c. *Initial Growth*

Initial Growth merupakan data pertumbuhan ekonomi yang diambil dari satu tahun sebelum tahun penelitian. Data ini diperoleh dari badan pusat statistik (BPS), dan merupakan data sekunder yang merupakan kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dengan lintas waktu individu (*cross section*) di 10 (sepuluh) provinsi pulau Sumatera selama periode 2012-2017 dalam satuan persentase.

d. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan dan penduduk yang telah memasuki usia kerja (*working age population*). Variabel tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data rasio penduduk dengan umur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah penduduk (EPR) yang termasuk dalam angkatan kerja. Data ini diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) untuk 10 (sepuluh) provinsi di pulau Sumatera pada periode 2012-2017 dalam satuan presentase (%).

e. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data rasio realisasi pengeluaran pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPK) untuk 10 (sepuluh) provinsi dipulau Sumatera pada priode 2012-2017 dalam satuan presentase (%).

E. Model dan Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis dengan model ekonomi Levine and Renelt (1992) yakni sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 M + \alpha_2 Z + \mu \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
 - I = Variabel Fungsi Pertumbuhan
 - M = Variabel Minat Peneliti
 - Z = Variabel pendukung atas Variabel Minat Peneliti
 - μ = *Error Term*
- α_1 , α_2 dan α_3 = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi, kemudian model diatas ditransformasikan kedalam model persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$EG_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 PAD_{it} + \alpha_2 PMDN_{it} + \alpha_3 L_{it} + \alpha_4 GE_{it} + \alpha_5 EG_{it-1} + \mu_{it} \dots\dots\dots(3.2)$$

Keterangan:

- EG = Pertumbuhan Ekonomi (persen)
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (persen)
- PMDN = Penanaman Modal Asing Langsung (persen)
- L = Tenaga Kerja (persen)
- GE = Pengeluaran Pemerintah (persen)
- EG_{t-1} = *initial Growth* (persen)
- i = 1, 2, ..., n, menunjukkan jumlah lintas individu (*cross section*)
- t = 1, 2, ..., t, menunjukkan dimensi runtut waktu (*time series*)
- α_0 = Konstanta (*intercept*)
- α_1 , α_2 , α_3 , α_4 dan α_5 = Koefisen Regresi
- μ = *Error Term*

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Panel

Data panel adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu (provinsi) pada sebuah periode waktu tertentu. Data panel merupakan gabungan dari data deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*). Simbol yang digunakan adalah runtut periode observasi, sedangkan adalah *unit cross-section* yang diobservasi. Proses pembentukan data panel adalah dengan cara mengkombinasikan unit-unit deret waktu dengan kerat lintang sehingga terbentuklah suatu kumpulan data. Jika jumlah periode observasi sama banyaknya untuk tiap-tiap unit *cross-section* maka dinamakan *balanced panel*. Sebaliknya jika jumlah periode observasi tidak sama untuk tiap-tiap unit *cross-section* maka disebut *unbalanced panel* (Widarjono, 2013).

2. Estimasi Model Panel

Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Tiga macam pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. *Common Effect Model (CEM)*

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode PLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu (Widarjono, 2013) Adapun bentuk utama dari *Common Effect Model* adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Untuk $i=1, 2, \dots, N$ dan $t=1, 2, \dots, T$.

Dimana N adalah jumlah Unit *Cross Section* (daerah) dan T adalah jumlah periode waktu. Dengan mengasumsikan komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, kita dapat melakukan proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section*nya

b. Fixed Effect Model (FEM)

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan dikenal dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep, namun intersepnya sama antar waktu. Disamping itu, model ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model estimasi ini seringkali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) (Widarjono, 2013).

c. Random Effect Model (REM)

Dimasukkannya variabel dummy didalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi dengan berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error term*) dikenal sebagai metode *random effect*. Dalam menjelaskan *random effect*, parameter-

parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error (Widarjono, 2013).

3. Pemilihan Model Regresi

Beberapa hal yang akan dihadapi saat menggunakan data panel adalah koefisien Slope dan intersepsi yang berbeda pada setiap antar ruang dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, asumsi intersepsi, slope, dan error-nya perlu dipahami karena ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, beberapa kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya, semakin kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode seperti pendekatan *common effect Model*, *fixed effect Model*, dan *random effects Model* (Widarjono, 2013). Dari ketiga teknik estimasi tersebut akan menghasilkan beberapa kemungkinan yang menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut:

3.1. Uji Chow

Pengujian yang pertama adalah untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model *fixed effect* dan *Ordinary Least Square*. Untuk melakukan pengujian tersebut dengan melihat koefisien determinasi (R^2) dan nilai *DW- statistic*. Nilai yang tinggi dari dua pengujian tersebut akan mengindikasikan pemilihan model terbaik, apakah menggunakan metode *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect* (FEM) adapun hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Common Effect (menerima H_0)
 H_a : Model Fixed Effect (menolak H_0)

Apabila $F\text{-stat} > F\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect*. Sebaliknya apabila $F\text{-stat} < F\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa model *common effect* lebih baik dari pada model *fixed effect*.

3.2 Uji Hausman

Pengujian berikutnya yang dilakukan adalah untuk memilih teknik analisis yang paling baik di antara model *random effect* dan model *fixed effect* untuk digunakan dalam pengujian regresi. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan melakukan uji *Hausman*. Cara memilih yang terbaik dalam uji *Hausman* yaitu dengan melihat *chi square Statistic* dengan *degree of freedom* ($df=k$), dimana k adalah jumlah koefisien yang diestimasi. Jika pada pengujian menunjukkan hasilnya signifikan artinya menolak H_0 , artinya metode yang dipilih adalah *Fixed Effect* dan sebaliknya, jika tidak signifikan maka model yang terbaik adalah *Random Effect*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect* (Menerima H_0)
 H_a : Model *Fixed Effect* (Menolak H_0)

Pada aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini (eviews 9), apabila nilai *chi square* statistik/hitung $>$ *chi-square* tabel dan $p\text{-value}$ signifikan ($P\text{-value} < \alpha$) maka H_0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *fixed effect*, sebaliknya apabila nilai *chi-square* statistik/hitung $<$ *chi square* tabel dan

P-value > maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *random effect*.

3.3 Uji Lagrange Multiplier

Apabila dari kedua pengujian sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu pengujian atau bahkan kedua pengujian ada yang menerima H_0 , selanjutnya dilakukan pengujian yang dinamakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang disebut juga *Breusch-Pagan Random Effect*. Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memilih teknik analisis model mana yang akan digunakan paling baik di antara model *common effect* dan model *random effect*. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Tidak ada *Random Effect*.....(menerima H_0)

H_a : Model *Random Effect*.....(Menolak H_0)

Hasil uji *Lagrange Multiplier* akan dilihat nilai *statistik chi-square* hasil olahan data *evIEWS*. Apabila nilai dari uji *Lagrange Multiplier* nilainya lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-squares*, maka H_0 ditolak. Dengan kata lain akan digunakan model *random effect* karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari hasil Uji *Lagrange Multiplier* berada dibawah nilai kritis statistik *chi-square* maka H_0 diterima. Jika H_0 diterima maka dapat diambil kesimpulan lebih baik menggunakan model *random effect*.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan program *EvIEWS*

9. Analisis Regresi linier berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Model dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji hipotesis (uji statistik t), uji ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. Apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dapat diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika t-hitung lebih rendah dari t-tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi parameter individual pada tingkat kepercayaan 99%, dengan derajat kebebasan ($df = (n-k)$). Pengujian ini berdasarkan pada nilai yang bernilai positif dan negatif. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$; $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$; $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

Hipotesis 1

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$H_1 : 1 = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi

$H_1 : 1 > 0$ terdapat pengaruh positif antar variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis 2

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

$H_2 : 2 = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar penanaman modal dalam negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

$H_2 : 2 > 0$ terdapat pengaruh positif antar penanaman modal dalam negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis 3

Tenaga Kerja

$H_3 : 3 = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar tenaga kerja terhadap pertumbuhan Ekonomi

$H_3 : 3 > 0$ terdapat pengaruh positif antar tenaga kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis 4

initial growth

$H_4 : 4 = 0$ artinya 0 tidak terdapat pengaruh signifikan antar *initial growth* terhadap pertumbuhan Ekonomi

$H_4 : 4 > 0$ terdapat pengaruh positif antar *initial growth* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis 5

Pengeluaran Pemerintah

$H_5 : \beta = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antar pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi

$H_5 : \beta > 0$ terdapat pengaruh positif antar pengeluaran pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

(Uji statistik F)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan uji statistik F dengan menggunakan tingkat kepercayaan 99% dan dengan derajat kebebasan ($df_1 = (k-1)$) dan ($df_2 = (n-k-1)$). Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

H_0 : seluruh variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

H_a : seluruh variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

4. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Koefisien determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati, 2012). Nilai kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai *adjusted R^2* yang mendekati satu berarti menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen dan bila

adjusted R² mendekati nol maka semakin lemah variabel independen menerangkan variabel dependen terbatas (Ghozali, 2013).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai Berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja (L) dan *Initial Growth* (EG_{t-1}). berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 10 (sepuluh) provinsi di pulau Sumatera periode 2012-2017. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan, Sedangkan Pengeluaran Pemerintah (GE) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (EG)
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga Kerja (L), Pengeluaran Pemerintah (GE) dan *Initial Growth* (EG_{t-1}) secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 10 (sepuluh) provinsi di pulau sumatera periode 2012-2017.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya meninjau kembali pengeluaran pemerintah masing-masing provinsi, khususnya di 10 (sepuluh) Provinsi di Pulau Sumatera yang ada pada penelitian ini. Apakah pengeluaran pemerintahnya sudah tepat kepada pos-pos yang akan memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu,

pemerintah meningkatkan pengeluaran pemerintah seperti belanja pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan sarana dan prasarana lainnya serta pemerintah sebaiknya mengawasi penggunaan APBD/APBN agar dana tersebut dapat digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien terhadap realisasi anggarannya.

2. Pemerintah sebaiknya dalam melakukan pembangunan ekonomi di setiap provinsi yang ada di Pulau Sumatera pemerintah harus melihat kondisi geografis dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing provinsi agar pembangunan tersebut mendukung aktivitas-aktivitas para pelaku ekonomi yang dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
3. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kepastian hukum terkait dengan investasi, dan memberikan kemudahan dalam hal perizinan kepada investor asing maupun domestic sehingga para investor tertarik berinvestasi di Indonesia khususnya di 10 (sepuluh) Provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah juga sebaiknya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.
4. Pemerintah sebaiknya menciptakan perluasan lapangan kerja baru khususnya melalui program vokasi dalam mengatasi jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan perkerja seperti pelatihan teknologi kepada angkatan kerja khususnya para angkatan kerja informal di 10 (sepuluh) provinsi di pulau sumatera yang memadai untuk mendukung produktivitas yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

5. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kembali pendapatan masing-masing daerah melalui intensifikasi dan extensifikasi penerimaan pajak , khususnya di 10 (sepuluh) provinsi di pulau Sumatera yang ada pada penelitian ini. Apakah pendapatan daerah sudah tepat digunakan kepada pos-pos yang akan memicu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi kebijakan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan digunakan untuk membangun sarana dan prasana yang memadai untuk menarik investor asing maupun domestik untuk berinvestasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A Samuelson, dkk. 2003. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Pulau Sumatera Dalam Angka Tahun*, (berbagai tahun penerbitan), jakarta..
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tenaga kerja provinsi Indonesia* . Jakarta. Badan Pusat Statistik. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Pendapatan Nasional* . Jakarta. Badan Pusat Statistik. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2015. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi* . Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi* . Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2014-2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi* . Jakarta. Badan Pusat Statistik.
- Basri, F. 2002. *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Barimbing, Y.S., Karmini, N.L. 2015. “ Pengaruh PAD, Tenaga Kerja, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali”. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol,4 No.5, pp. 434-450.
- Boediono. 1999. *Ekonomi Makro*. 4th Ed. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Dumairy, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Guritno, 2001, *Ekonomi publik*, BPFE, Yogyakarta. Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar (Terjemahan Sumarno Zain)*. Jakarta.
- Hapsari, Rahma Dian dan Prakoso Imam. (2016). Penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi di Indonesia. *Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Jakarta. Volume 19 No. 2, Agustus 2016. ISSN 1979 - 6471*

- Hellen, (2017). *Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja*. Inovasi. Volume 13 (1), 2017, 28-38
- Jhingan,ML.2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Junaidi, dkk. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol.2No.2,Oktober-Desember2014 ISSN: 2338-4603.
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kurniawan,dkk. (2017). Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi.
- Kusriyawanto.(2014). Pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah 1994-2010.
- Levine, Ross, dan Renelt, David. 1992. "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions". *The American Review*, Vol. 8 No.3, pp. 8-14.
- Lincoln. Arsyad, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4 Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbit Bagian Penerbitan Sekiloh Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mankiw, N. Gregory. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Edisi keempat Jakarta.Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Teori Makro Ekonomi*. Edisi keenam. Jakarta.Erlangga
- Nistor, Paula. (2014). FDI and economics Growth in Rumania. Emerging Markets queries finance in business. *Procedia Economics and Finance 15 (2014) 577 – 582*. Science direct.
- Ramayani,Citra.(2013).Pengaruh investasi pemerintah, investasi swasta, inflasi, export, dan produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Economic and Economic Education Vol.1 No.2 (203-207)*.
- Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Dauglas D. Purvis. 1993. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Rizieq, Rahmatullah.(2016). Kausalitas antara pembentukan modal tetap dan pertumbuhan ekonomi di empat Negara asean. *Jurnal ekonomi dan Bisnis*.

- Rofii, Andrik Mukamad & Ardyan, Putu Sarda. (2017). analisis pengaruh inflasi, penanaman modal asing dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di jawa timur. *Jurnal Ekonomi dan bisnis*.
- Salebu, Jefri Batara. (2014). Pengaruh penanaman Modal Asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia : analisis data panel periode 1994-2013. *Jurnal BPPK Volume 7 nomor 2*.
- Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. 2002. *Makro ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sanjaya, Wina. 2012. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sari, Mutia Dkk. (2016). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*.
- Suindyah, Sayekti. 2011. “ Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ekuitas*, Vol.15 No,4, pp. 477-500.
- Sukirno, Sardono (2010). *Makroekonomi: teori pengantar*, edisi ketiga. Raja grafindo persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2008. *teori pengantar makroekonomi edisi 3*. PT. Raja grafindo persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2002. *pengantar teori makroekonomi edisi 1*. PT. Raja grafindo persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2013. *pengantar teori makroekonomi edisi 1*. PT. Raja grafindo persada, Jakarta.
- Suwandika, Putu Eka. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan di provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: ANDI.
- Tambunan, Tulus. 2008. *Pembangunan Ekonomi dan Utang Luar Negeri*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal.

Universitas Lampung. 2016. Format Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Putri, Phany Ineke. (2014). Pengaruh investasi, tenaga kerja, belanja modal, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau jawa.

Putri, Zuwesty Eka.(2015). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi jawa tengah. *Jurnal Bisnis dan manajemen*.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Penerbit Ekonesia FE UI. Yogyakarta.

Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Yuliana. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. *JURNAL Akuntansi & Keuangan Vol.5, No. 1, Maret 2014 Halaman 33 – 48*